



TATA CARA PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BOGOR

Paparan untuk Tim Satgas SPIP pada Perangkat Daerah

WIDIATMOKO
Auditor Muda Inspektorat Daerah

KAJIAN KONSEP PERDEP 4 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA

Peraturan Deputi Kepala BPKP
Bidang PPKD Nomor 4 Tahun
2019 mengacu pada PP 60/2008
karena PP 60/2008 merupakan
mandat BPKP



Pasal-Pasal PP 60/2008

- Satu unsur SPIP adalah ‘penilaian risiko’ (Pasal 3).
- Instansi pemerintah yang kepemimpinannya kondusif cenderung “mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan” (Pasal 7).
- “[Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko” (Pasal 18).
- Instansi pemerintah mesti mempertimbangkan “pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif” (Pasal 23).
- [APIP] yang efektif adalah yang “memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Pasal 11).”
- Untuk mencapai tujuan instansi pemerintah, pimpinan instansi pemerintah mesti menetapkan “strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko” (Pasal 14).
- “[P]impinan Instansi Pemerintah mempertimbangkan seluruh risiko akibat kegagalan pencapaian tujuan” (penjelasan Pasal 16).
- “[P]impinan Instansi Pemerintah mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat misinya atau pada signifikansi dan kompleksitas dari setiap program atau kegiatan spesifik yang dilaksanakan” (penjelasan Pasal 16).

Lampiran PP 60/2008:

- “Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.”
- “[P]impinan Instansi Pemerintah atau evaluator harus berkonsentrasi pada penetapan tujuan instansi, pengidentifikasian dan analisis risiko serta manajemen risiko pada saat terjadi perubahan”.
- “Identifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta rencana strategis”.

RISIKO DAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

“Kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran entitas”

(COSO)

”Kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah”

(PP 60/2008 Ps. 3 ayat 1.b)

“Kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan”

(AS/NZS 4360 : 2004)

”Suatu efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran organisasi”

(ISO 31000)

UNSUR-UNSUR RISIKO



”Risiko Pemda sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh pemda”



KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

- a. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan Risiko Strategis dan Operasional OPD

2. Penetapan Struktur analisis Risiko

- a. Sebab Risiko
- b. Dampak Risiko

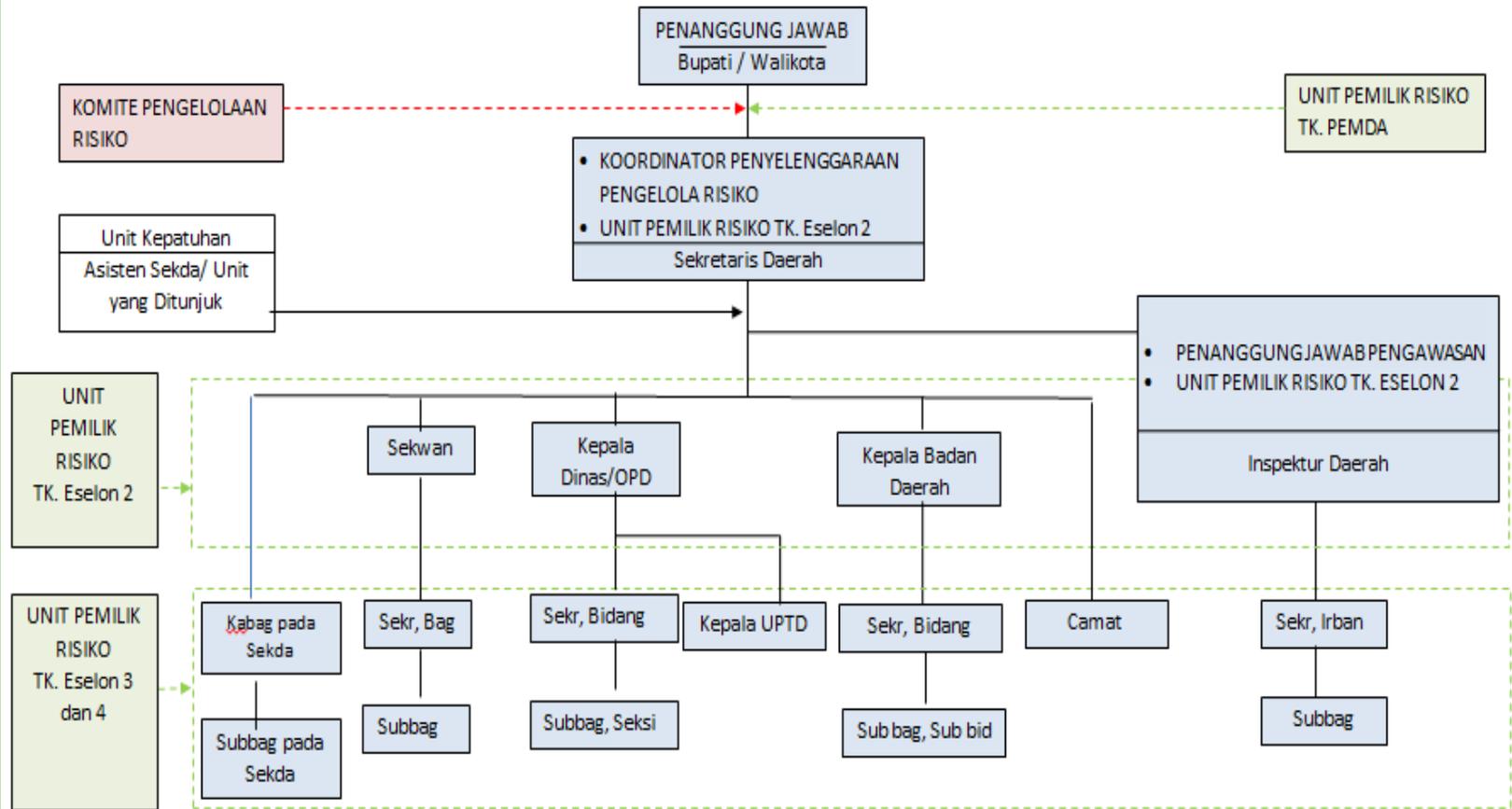
3. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

- a. Skala Dampak
- b. Skala Probabilitas
- c. Skala Nilai Risiko

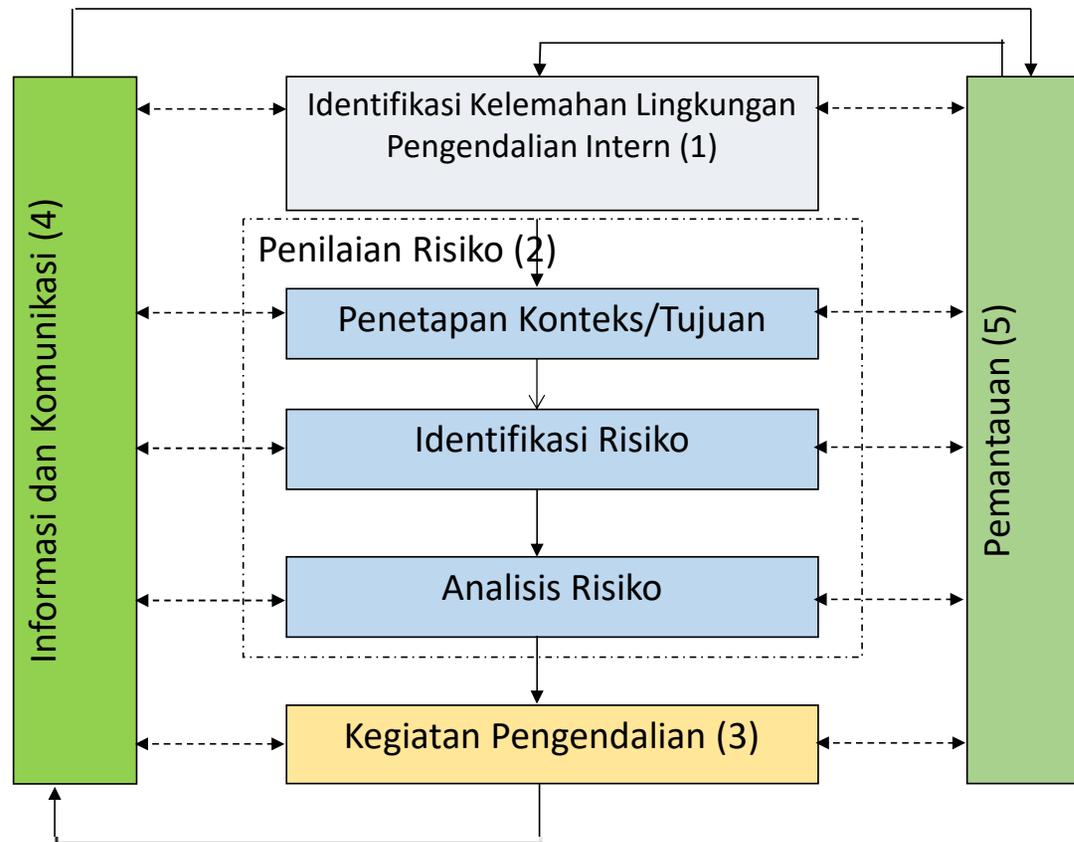
4. Penetapan Struktur Pengelolaan Risiko

- a. Penanggung Jawab
- b. Komite Pengelolaan Risiko
- c. Unit Pemilik Risiko
- d. Unit Kepatuhan
- e. Penanggung Jawab Pengawasan

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA



Proses Pengelolaan Risiko



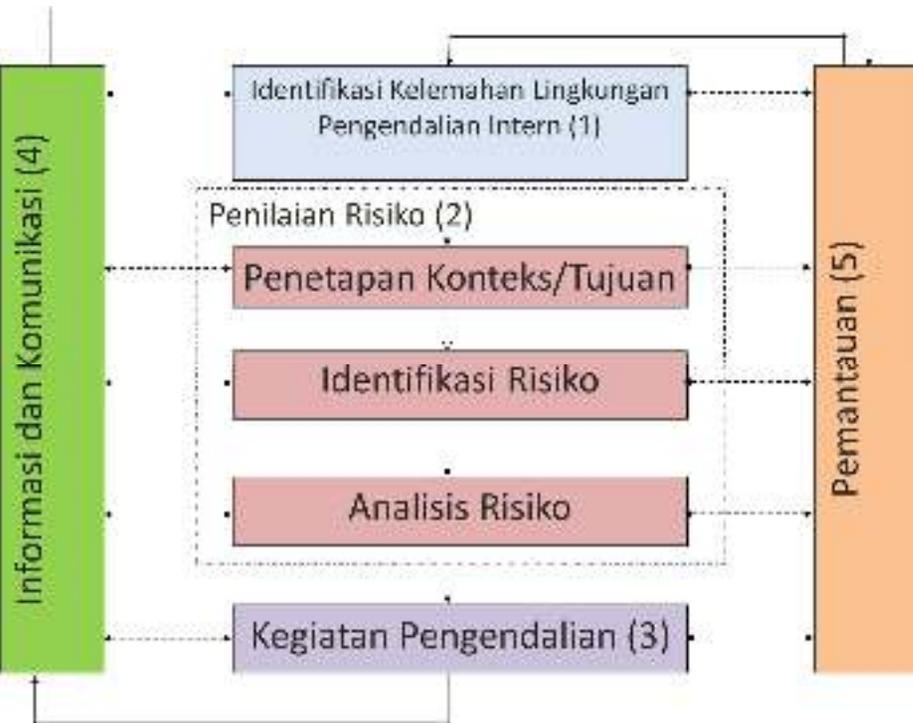
Diadopsi dari AS/NZS: 2004

Dalam penerapan pengelolaan risiko, terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian yaitu pembangunan/ perbaikan **Lingkungan Pengendalian** yang mendukung penciptaan **budaya** dan **sistem pengelolaan risiko**, dan implementasi unsur **Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi** serta **Pemantauan** menunjukkan pelaksanaan proses pengelolaan risiko

The image features a central blue circular area with a denim-like texture, containing white text. This circle is set against a light gray, ornate, shield-like background with decorative flourishes at the corners and edges. The entire composition is on a black background.

**KERTAS KERJA
PENGELOLAAN
RISIKO
PEMERINTAH
DAERAH**

PROSES PENGELOLAAN RISIKO



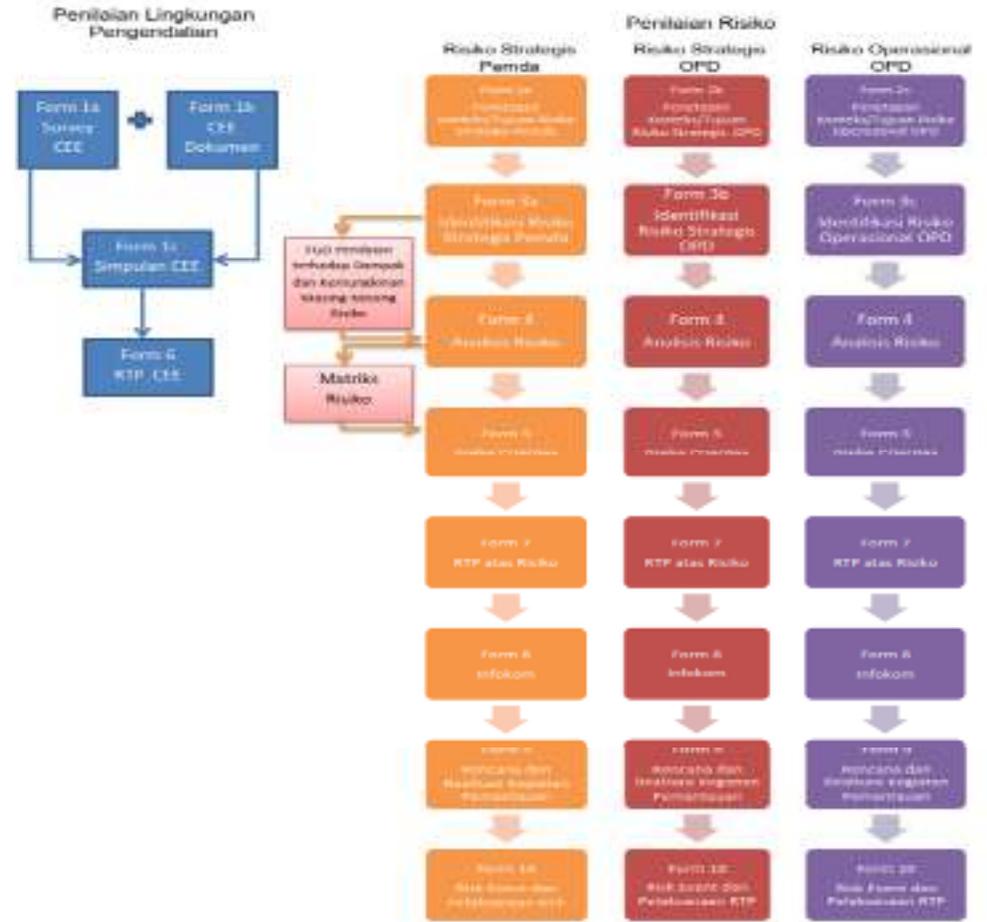
Diadopsi dari AS/NZS: 2004

Tahapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah atas Urusan Wajib/Pilihan

06 Desember 2021

Lampiran B

ALUR PROSES KERTAS KERJA PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH



PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penilaian	: 2018
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023
Visi	: Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia 4. Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Sasaran RPJMD	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten XYZ Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
IKU Sasaran RPJMD	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Nama Dinas Terkait	Dinas Kesehatan RSUD Kabupaten XYZ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat IKU Sasaran Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Penetapan Konteks/Tujuan Risiko Strategis Pemda

FORM 2a

Semua Tujuan Strategis dari RPJMD

Memilih Salah Satu Tujuan Strategis

Semua Sasaran Terkait dengan Tujuan Strategis Yang Dipilih

Semua OPD Terkait dengan Tujuan Strategis Yang Dipilih

Resume, Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang dipilih

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Penetapan Konteks/Tujuan Risiko Strategis OPD

FORM 2b

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC		
Tahun Penilaian	: 2018		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2019-2023		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ		
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.		
IKU Renstra OPD	IKU		2023
	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup		57
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup		3,2
	Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup		3,6
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan		100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi		Belum ada
	IKU Lansia		Belum ada
	IKU Gizi		Belum ada
IKU Kesehatan Reproduksi		Belum ada	
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran Strategis: Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi IKU Strategis: - Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup - Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup"		
	Dst		
		Kabupaten XYZ, September 2018 Kepala Dinas Kesehatan	

Tujuan Strategis Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda pada Form 2a

Sasaran Strategis dari Renstra

IKU dari Sasaran Strategis

CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD		
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC	
Tahun Penilaian	: 2018	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2019-2023	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	
Sumber Data	Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019	
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
Program Dinas Kesehatan (Renja 2019) dan Kegiatan Utama	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	7.455 ibu hamil
	2. Pertemuan ANC Terpadu	30 orang peserta
	3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah pada sektor eksternal	50 orang peserta
	4. Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	20 orang peserta
	5. Pelatihan penjangkaran untuk sekolah lanjutan 1 K1	20 orang peserta
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	
	Kabupaten XYZ, September 2018 Kepala Dinas Kesehatan	

Penetapan Konteks/Tujuan Risiko Operasional OPD

FORM 2c

Tujuan Strategis Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda pada Form 2a

Program dalam Renja yang terkait Tujuan Strategis Pilih salah satu (No.5)

Hasil Kegiatan dari Program Terpilih. Pilih Salah Satu.

2. PENILAIAN RISIKO IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi Risiko Strategis Pemda (Form 3a)

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
 Nama OPD : Dinas Kesehatan
 Tahun Penilaian : 2018
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Thun 2019-2023)
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Contoh Kode Risiko
pada Lampiran 6
Pedoman

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									
	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.1 9.01.02 .01	Kepala Daerah	Belum tersedianya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Tidak termasuk prioritas anggaran)	Internal	C	1. Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi 2. Angka kejadian Penyakit Menular tinggi 3. Angka <i>stunting</i> tinggi	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait
			Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.1 9.01.02 .02	Kepala Daerah	1. Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONE D tidak tersedia,) 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium, dokter, tenaga kesehatan)	Internal	C	AKI tinggi AKB tinggi Akaba Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka <i>stunting</i> tinggi	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait

Dari Penetapan konteks strategis pemda pada form 2.a

06 Desember 2021

12

2. PENILAIAN RISIKO IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi Risiko Strategis OPD (Form 3b)

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
 Nama OPD : Dinas Kesehatan
 Tahun Penilaian : 2018
 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2019-2023)
 Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Contoh Kode Risiko
pada Lampiran 6
Pedoman

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									
	Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi	1. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup 2. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.02.02.01	Kepala Dinas Kesehatan	Kurangnya Sosialisasi Kesehatan Keterlibatan lintas program lintas sektor (Posyandu, RT/RW, Lurah, Kecamatan, OPD terkait) rendah	Internal	C	Ibu hamil tidak mengetahui prosedur pelayanan dan tanda-tanda bahaya kehamilan	Dinkes RSUD Masyarakat
		3. Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO.19.02.02.02	Kepala Dinas Kesehatan	Kompetensi tenaga kesehatan tentang APN (bidan, dokter) rendah (TentangSDIDTK MTBS, neo natal esensial)	Internal	C	Kepuasan masyarakat rendah kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Dinkes RSUD Masyarakat
		4. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.02.02.03	Kepala Dinas Kesehatan	- Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi - Regen dan alat pendukung ANC kurang - Tenaga laboratorium di	Internal	C	Kualitas dan efektivitas pelayanan rendah Kepuasan masyarakat rendah	Dinkes RSUD Masyarakat
		5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.19.02.02.04	Kepala Dinas Kesehatan	Sistem kepegawaian	Internal	UC	Kualitas dan efektivitas pelayanan rendah Kepuasan masyarakat rendah	Dinkes RSUD Masyarakat

Dari Penetapan konteks strategis OPD pada form 2.b

06 Desember 2021

2. PENILAIAN RISIKO IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi Risiko Operasional OPD (Form 3c)

Identifikasi Risiko Operasional OPD												
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC											
Nama OPD	: Dinas Kesehatan											
Tahun Penilaian	: 2018											
Periode yang dinilai	: 2019											
Tujuan Strategis	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat											
Sasaran strategis OPD	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat											
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	Terbayar kanya Jaminan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.19.02.02.01	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit	Eksternal	UC	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat	
			Penatausahaan	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.19.02.02.02	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit	Eksternal	UC	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat	
			Pelaporan	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi	ROO.19.02.02.03	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Rumah Sakit (RS M. Yunus) menyampaikan klaim tidak lengkap	Eksternal	UC	Dana DAK Triwulan berikutnya tidak disalurkan oleh Kemenkeu	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat	
			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.02.02.04	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Evaluasi dilakukan terbatas pada output (jumlah bumil miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya terlayani jampersal)	Internal	C	Anggaran Jampersal tidak terserap 100%	Dinas Kesehatan	
	Pemberian Layanan	Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.02.02.05	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat	
				Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.19.02.02.06	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada database	Internal	C	Terhambatnya pelayanan	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat	
			Pelaksanaan	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (<i>double claim</i>)	ROO.19.02.02.07	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada database	Internal	C	Rendahnya kepuasan masyarakat	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat	
				Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama	ROO.19.02.02.08	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Kurangnya kordinasi	Internal	C	Terhambatnya pelayanan	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat	

Contoh Kode Risiko pada Lampiran 6 Pedoman

Dari Penetapan konteks Operasional OPD pada form 2.c

06 Desember 2021

Contoh
Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda		Pemintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC										
Nama OPD		Dinas Kesehatan										
Tahun Rencana		2016										
Periode yang dinilai		2019										
Tujuan Strategis												
Easaran strategis OPD												
Visi dan Misi												
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan dalam kondisi baik	Perencanaan	Penyusunan IHS tidak profesional		PAKPA, PPK	IHS yang ditetapkan oleh PPK dilakukan tanpa survey harga pasar, dan persyaratan terkait penyusunan HPS tidak ada data dukungan HPS)	Internal	C	Nilai pekerjaan menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya	OPD	
	Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan jalan	Perencanaan Dokumen Kontrak	Perubahan desain tidak diikuti dengan justifikasi dan perubahan (amandemen) kontrak		PAKPA, PPK	- Kesengajaan rekanan untuk menbah desain dalam rangka menguntungkan diri sendiri - Kelalaian konsultan pengawas dalam mengawasi pelaksana	Eksternal	C	Kualitas/kuantitas barang tidak sesuai spesifikasi/kebutuhan yang diharapkan	PPK, OPD	
	Sub Kegiatan: Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	Pelaksanaan	Data lapangan (jumlah material, back up quantity, laporan harian/bulanan) tidak sesuai dengan riil		PAKPA, PPK	Konsultan pengawas asal	Eksternal	C	Kelambatan pembayaran, volume tidak sesuai dengan kontrak	PPK, OPD	
			Penyelesaian Pekerjaan keterlambatan PHO			Kepala Daerah, PAKPA, PPK	PPK lalai dalam pengendalian pada proses pengerjaan kontrak. - Penyedia belum menyelesaikan pekerjaan hingga bebas waktu yang ditentukan - Kelalaian konsultan pengawas dalam mengawasi pekerjaan pelaksana	Internal/Eksternal	C	- Barang hasil pengadaan terlambat untuk digunakan sehingga berdampak pada efisiensi organisasi. - Timbulnya kewajiban untuk membayar denda bagi Penyedia	PPK, OPD dan Penyedia	

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor urut di Entitas/OPD	Kode
RSP	19	01	01	01	RSP.19.01.01.01
RSO	19	02	05	01	RSO.19.02.05.01
ROO	19	03	25	01	ROO.19.03.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

RSP Strategis Pemda
 RSO Strategis OPD
 ROO Operasional OPD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Pendidikan | 21 | Persandian |
| 02 | Kesehatan | 22 | Kebudayaan |
| 03 | PU dan Tata Ruang | 23 | Perpustakaan |
| 04 | Perumahan dan Kawasan Permukiman | 24 | Kearsipan |
| 05 | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 25 | Kelautan dan perikanan |
| 06 | Sosial | 26 | Pariwisata |
| 07 | Tenaga Kerja | 27 | Pertanian |
| 08 | Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak | 28 | Kehutanan/Perkebunan |
| 09 | Pangan | 29 | Energi dan sumber daya mineral |
| 10 | Pertanahan | 30 | Perdagangan |
| 11 | Lingkungan Hidup | 31 | Perindustrian |
| 12 | Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | 32 | Transmigrasi |
| 13 | Pemberdayaan masyarakat dan desa | 33 | Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif |
| 14 | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | 34 | Administrasi Kesekretariatan DPRD |
| 15 | Perhubungan | 35 | Pembinaan dan Pengawasan |
| 16 | Komunikasi dan informatika | 36 | Perencanaan pembangunan, litbang |
| 17 | KUKM | 37 | Keuangan dan Pendapatan |
| 18 | Penanaman Modal | 38 | Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| 19 | Kepemudaan dan olah raga | 39 | Bencana |
| 20 | Statistik | 40 | Politik |
| | | 99 | Lainnya |

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Pemda | 18 | Dinas Perhubungan |
| 02 | Sekretariat Daerah | 19 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 03 | Sekretariat DPRD | 20 | Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah |
| 04 | Inspektorat Daerah | 21 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu |
| 05 | Dinas Pendidikan | 22 | Dinas Pariwisata |
| 06 | Dinas Kesehatan | 23 | Dinas Pemuda dan Olah Raga |
| 07 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 24 | Dinas Perindustrian |
| 08 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 25 | Dinas Perpustakaan dan kearsipan |
| 09 | Satuan Polisi Pamong Praja | 26 | Dinas Pertanian |
| 10 | Dinas Sosial | 27 | Dinas Perikanan |
| 11 | Dinas Ketenagakerjaan | 28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 29 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah |
| 13 | Dinas Ketahanan Pangan | 30 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | 31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 32 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 33 | RSUD |
| 17 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 99 | Lainnya |

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No.	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	2	3	4
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2.	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No.	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	2	3	4
1.	Rendah sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2.	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi	2
3.	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal	3
4.	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal	4

Status Risiko merupakan perkalian dari Kemungkinan dengan Dampak, dengan kriteria status rendah (*low*); sedang (*moderate*); tinggi (*high*); tinggi sekali (*very high*).

KEMUNGKINAN	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
	<i>Angka</i>	1	2	3	4
		DAMPAK			

No	Status Risiko	Skor Status Risiko
1	rendah (<i>low</i>)	$0 < SR < 2$
2	sedang (<i>moderate</i>)	$2 < SR < 4$
3	tinggi (<i>high</i>)	$4 < SR < 8$
4	tinggi sekali (<i>very high</i>)	$8 < SR < 16$

RISIKO PRIORITAS

- RISIKO DENGAN STATUS TINGGI (HIGH); DAN
- RISIKO DENGAN STATUS TINGGI SEKALI (VERY HIGH)

2. PENILAIAN RISIKO ANALISIS RISIKO

Analisis dampak dan kemungkinan risiko/ Analisis Risiko (Form 4)

Hasil Analisis Risiko					
Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi BC			
Tahun Penilaian		: 2018			
Tujuan Strategis		: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis					
1	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.19.01.01.01	3	3	9
2	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	4	4	16
II Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kesehatan					
1	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.01.05.01	4	3	12
2	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO.19.01.05.02	4	2	8
3	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.03	4	4	16
4	Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.19.01.05.04	4	3	12
III Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan					
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.01	4	3	12
2	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.02	4	2	8
3	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi	ROO.19.01.05.03	4	2	8
4	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.01.05.04	4	3	12
5	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.05	4	4	16
6	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.19.01.05.06	2	2	4
7	Proses <i>cross check</i> data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama	ROO.19.01.05.07	3	2	6
8	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (<i>double claim</i>)	ROO.19.01.05.08	3	1	3

Hasil Identifikasi Risiko di Form 3a

Hasil Identifikasi Risiko di Form 3b

Hasil Identifikasi Risiko di Form 3c

Hasil Rata-rata Penilaian dari Peserta FGD

2. PENILAIAN RISIKO ANALISIS RISIKO

Memvalidasi risiko/ Risiko Prioritas (Form 5)

Daftar Risiko Prioritas						
Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC				
Tahun Penilaian		: 2018				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	16	Kepala Daerah	1. Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONEC tidak tersedia,) 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium,	AKI tinggi AKB tinggi Akaba Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka stunting tinggi
II Risiko Strategis OPD 1						
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.03	16	Kepala Dinas	'- Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi '- Regan dan alat pendukung ANC kurang '- Tenaga laboratorium di Puskesmas kurang	Kualitas pelayanan ANC tidak sesuai SPM kesehatan
III Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan						
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.05	16	Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Perencanaan kurang tepat
06 Desember 2021						

Hasil Pemilihan Risiko dari Form 4 yang akan dilakukan Tindak Pengendalian

3. KEGIATAN PENGENDALIAN

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas Risiko (Form 7)

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Risiko Prioritas dari Form 5 yang akan dilakukan Tindak Pengendalian

- Kolom d Diisi dengan alasan tidak efektif:
- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
 - (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
 - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
 - (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC					
Tahun Penilaian		: 2018					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	SOP Pertolongan Persalinan	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Kepala Daerah	Triwulan IV 2019
II Risiko Strategis Dinas Kesehatan							
1	Sarana pendukung Ante Natal Care (ANC) kurang memadai	RSO.19.01.05.03	SOP Kalibrasi Alat	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Kepala Dinas	Triwulan I 2019
			Standar Pelayanan Puskemas (Permenkes Nomor 75	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Kepala Dinas	Triwulan II 2019
III Risiko Operasional Dinas Kesehatan							
1	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.05	Juknis Penggunaan DAK Non Fisik (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Kepala Bagian	Triwulan II 2019
06 Desember 2021							

4. Informasi dan Komunikasi

Pengomunikasian Pengendalian yang Dibangun (Form 8)

Rencana Tindak Pengendalian dari Form 7

CONTOH

PENINGKATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ						
Tahun Penilaian	: 2018						
Tujuan Strategis	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Rapat	Sekda/Bappeda	Dinas Kesehatan BKPSDM	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
2	Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
3	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskesmas	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
4	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen

06 Desember 2021

24

5. Pemantauan

Rancangan Pemantauan atas RTP (Form 9)

CONTOH

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN



Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ				
Tahun Penilaian	: 2018				
Tujuan Strategis	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan				

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DINas Kesehatan Direktur RSUD	Oktober. November, Desember 2019	Oktober. November, Desember 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
2	Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DINas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
3	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DINas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
4	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019) 06 Desember 2021	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala DINas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan

PELAPORAN

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN RISIKO



PENYUSUNAN LAPORAN



Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

- Penilaian Risiko Strategis Pemda
- Penilaian Risiko Strategis OPD
- Penilaian Risiko Operasional OPD



Unit Pemilik Risiko

Menyusun:
1. Laporan Hasil Penilaian Risiko
2. Laporan Rencana Tindak Pengendalian



Disampaikan kepada
1. Kepala Daerah
2. Tembusan:
• Sekretariat Daerah
• Unit Kepatuhan Internal

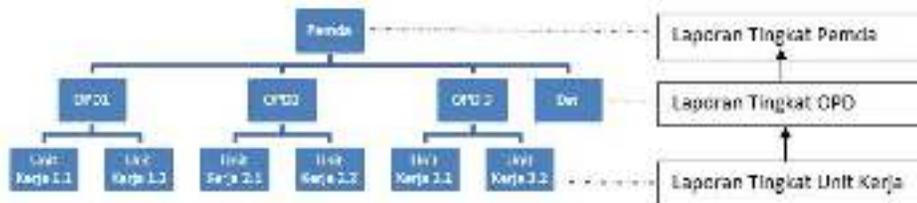
CONTOH OUTLINE (DAFTAR ISI)

LAPORAN/DOKUMEN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

I	Pendahuluan A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Ruang Lingkup
II	Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
III	Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian A. Penetapan Konteks/Tujuan B. Hasil Identifikasi Risiko C. Hasil Analisis Risiko D. Pengendalian Terpasang E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
IV	Rancangan Informasi dan Komunikasi
V	Rancangan Pemantauan
VI	Penutup
	Lampiran

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan dan tahunan.



- Dibuat oleh Unit Pemilik Risiko
- Disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatua Internal.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan
2. Laporan Tingkat OPD
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Triwulanan
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan
3. Laporan Tingkat Pemda
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemda Triwulanan
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemda Tahunan

C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal

Periode Pelaporan

Dibuat secara Triwulanan dan Tahunan

Penerima Pelaporan

Disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretariat Daerah

The slide features a white background with several stylized, light gray clouds. A large, horizontal cloud-like shape is at the top left. A smaller, rounded cloud is in the top right. A large, multi-lobed cloud is at the bottom left. A single, rounded cloud is in the bottom right. The text 'TERIMA KASIH' is centered in the middle of the slide, with the 'K' partially overlapping the large cloud at the bottom left.

TERIMA KASIH